



- ◆Komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( manufacturing) : dasar hukum, sarana dan prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelayanan
- ◆ Permasalahan yang dihadapi oleh dinas :
  1. Masih dijumpai warga masyarakat melakukan proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
  2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program Identitas Kependudukan Digital
  3. Masih banyaknya pemohon langsung dalam pengurusan dokumen adminduk ke layanan kantor dinas
  4. Masih dijumpai penyampaian keluhan atau aduan terkait layanan tidak melalui sarana yang disediakan
  5. Jumlah pelaksana pelayanan belum memadai
- 4. Saran, masukan dan pertanyaan :
  - Tokoh masyarakat : terkait dengan jangka waktu pelayanan apa tidak bisa dimajukan untuk penyelesaiannya.
  - Jogoboyo Ponjong : masih perlunya sosialisasi dan penyebar luasan program pemerintah seperti IKD
  - Kapanewon Semanu : bagaimana status anak dalam kartu keluarga bila telah resmi diadopsi
- 5. Penanda tangan berita acara pelaksanaan forum konsultasi publik antara tim penyelenggara forum konsultasi publik dinas dan perwakilan pihak terkait yang terdiri dari stake holder, akademisi, tokoh masyarakat serta media masa
- 6. Penutup  
Forum konsultasi publik ditutup dengan berdoa dengan usulan rekomendasi perbaikan pada identifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Review standar pelayanan menyesuaikan dengan perkembangan / dinamika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan jangka waktu pelayanan dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja</li> <li>2. Mempunyai mental pelayanan publik</li> <li>3. Penambahan nomor WA layanan aduan</li> <li>4. Spirit layanan Cedak Kepenak Semanak</li> </ol>	2025
2	Masih dijumpai warga masyarakat melakukan proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyebar luasan informasi dan sosialisasi oleh Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial P3A kolaborasi secara berkesinambungan</li> <li>2. Adanya advokasi dan edukasi kepada warga masyarakat</li> </ol>	2025
3	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program Identitas Kependudukan Digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi akan arti penting IKD</li> <li>2. Perluasan informasi dan akses layanan IKD</li> <li>3. Layanan jemput bola di event / lokasi setiap saat sesuai agenda masyarakat</li> </ol>	2025
4	Masih banyaknya pemohon langsung dalam pengurusan dokumen adminduk ke layanan kantor dinas	Penguatan sarana dan prasarana layanan adminduk di kalurahan dan kapanewon melalui Dana Keistimewaan secara berkelanjutan	Mulai 2025
5	Masih dijumpai penyampaian keluhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya sosialisasi dan publikasi terhadap sarana maupun kanal</li> </ol>	2025

	atau aduan terkait layanan tidak melalui sarana yang disediakan	aduan secara berkelanjutan 2. Meningkatkan literasi pada warga masyarakat melalui sosialisasi secara berkelanjutan	
6	Jumlah pelaksana pelayanan belum memadai	Usulan tambahan SDM di kapanewon maupun dinas kepada BKPPD secara bertahap	Desember 2024

Wonosari, 25 November 2024

Notulis



MURYANI, S.IP